

Analisis Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) Pada Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Mekar Jaya Abadi Desa Sei-Limbat

¹Dinda Anggi Nurhayati, ²Saparuddin Siregar, ³Atika

^{1,2}Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

³Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

Email : dindaanggi01@gmail.com, saparuddin.siregar@uinsu.ac.id, atika.uinsu@ac.id

Corresponding Mail Author : dindaanggi01@gmail.com

Abstract: BUMDes Mekar Jaya Abadi is a BUMDes in Langkat, located in Sei-Limbat village. BUMDes Mekar Jaya Abadi is an economic institution formed since 5 years and engaged in savings and loan business, trade, PPOB run by the village community. SAK ETAP is a standard created to be used in Financial Reporting published for many purposes for non-public organizations, that is, organizations without significant public responsibility. The purpose of this study is to explain the presentation of the Financial Statements of BUMDes Mekar Jaya Abadi, to compare the financial statements of BUMDes Mekar Jaya Abadi with SAK ETAP and also to explain whether the financial statements of BUMDes Mekar Jaya Abadi is in accordance with SAK ETAP. This study uses qualitative methods with descriptive approach. Sources of research data are primary data and secondary data. The results showed that the Financial Statements of village-owned enterprises (BUMDes) Mekar Jaya Abadi sei-Limbat village has not implemented SAK ETAP. Accounting practices in BUMDes referring to SAK ETAP (2013) have not been implemented due to lack of knowledge of BUMDes management regarding SAK ETAP. BUMDes Mekar Jaya Abadi desa Sei-Limbat only presents the balance sheet and Income Statement. And in each financial statement does not present the minimum items as stipulated in SAK ETAP.

Keywords: SAK ETAP, Financial Report, BUMDes Mekar Jaya Abadi.

I. Pendahuluan

Indonesia ialah Negara yang terdiri dari berbagai provinsi dan terbagi atas beberapa kabupaten atau kota. Setiap daerah provinsi, kabupaten atau kota memiliki pemerintah daerah yang diatur dalam undang-undang. Dalam rangka pembangunan nasional, pemerintah pusat akan sangat kesulitan untuk mengatur setiap daerah atau wilayah yang ada di Indonesia. Pemerintah Indonesia menetapkan adanya kebijakan otonomi daerah agar pembangunan nasional yang diawali dengan pembangunan setiap daerah dapat dijalankan dengan maksimal dan setiap daerah bisa memanfaatkan potensi yang ada di daerah tersebut.

Desa sangat berperan penting dalam rangka tercapainya pembangunan nasional karena masyarakat Indonesia kebanyakan tinggal di pedesaan. Desa adalah bagian

terkecil dalam sistem Pemerintahan Indonesia. Undang-undang Desa No. 6 Tahun 2014 menyebutkan “Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah, yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)”. Desa juga dapat diartikan sebagai pemukiman masyarakat yang terletak jauh dari kota dan mayoritas pekerjaan penduduknya ialah bertani.

Untuk meningkatkan kehidupan masyarakat desa, maka diperlukan suatu upaya untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di desa agar tidak hanya tergantung pada bantuan pemerintah daerahnya sendiri. Maka pemerintah melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa membentuk suatu badan keuangan yaitu Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang sesuai dengan Permendagri Nomor 39 Tahun 2010 tentang badan usaha milik desa, yang menyebutkan bahwa: “untuk meningkatkan kemampuan keuangan pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui berbagai kegiatan usaha ekonomi masyarakat pedesaan, didirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan potensi desa”.

BUMDes dalam melaksanakan penyusunan laporan keuangan harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh standar keuangan yang digunakan. Artinya dalam penyusunan laporan keuangan maka BUMDes harus mengacu pada pedoman umum yaitu Standar Akuntansi Keuangan Tanpa Akuntabilitas Publik atau sering disebut SAK ETAP. SAK ETAP adalah standar keuangan yang dibuat dengan tujuan digunakan entitas tanpa akuntabilitas publik. Entitas tanpa akuntabilitas publik adalah entitas yang:

1. Tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan, dan
2. Menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum (general purpose financial statement) bagi pengguna eksternal. Contoh pengguna eksternal adalah pemilik yang tidak terlihat langsung dalam pengelolaan usaha, kreditur, dan lembaga pemeringkat kredit.

Kabupaten Langkat ialah Kabupaten yang terletak di Sumatera Utara dan terus menerus melakukan pembangunan dibidang ekonomi. Hasil nyata pembangunan bidang ekonomi yaitu banyak terbentuk dan berkembang BUMDes di Kabupaten Langkat.

BUMDes Mekar Jaya Abadi adalah BUMDes di Langkat, yang terletak di desa Sei-Limbat. BUMDes Mekar Jaya Abadi merupakan lembaga ekonomi terbentuk sejak 5 tahun dan bergerak dibidang usaha simpan pinjam, perdagangan, PPOB yang dijalankan masyarakat desa. Pada operasional keuangan BUMDes Mekar Jaya Abadi, banyak yang beranggapan bahwa pengelolaan keuangan sangat mudah dan sederhana. Kenyataannya, laporan keuangan yang disajikan masih terdapat banyak kekurangan karena hanya menyajikan neraca dan laporan laba rugi. Jika BUMDes Mekar Jaya Abadi ingin usahanya terus berkembang, maka penggunaan SAK ETAP dapat memudahkan penyajian laporan keuangan tersebut.

II. Landasan Teori Dan Metode Penelitian

Landasan Teori

Pengertian SAK ETAP

SAK ETAP adalah standar keuangan yang dibuat dengan tujuan digunakan entitas tanpa akuntabilitas publik, yaitu entitas tanpa tanggung jawab publik yang signifikan.

Penerapan PSAK (IFRS) terlalu rumit jika digunakan sebagian besar usaha kecil dan menengah, karena itu perlu adanya standar baru yang akan memudahkan ketika membuat laporan keuangan, yaitu harus berpedoman pada Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP).

SAK ETAP diterbitkan pada tanggal 17 Juli 2009, akan tetapi penerapannya baru bisa digunakan sesudah 1 Januari 2011. Perusahaan yang masuk dalam kriteria ETAP dan menggunakan SAK sebelum tahun 2011, wajib menggunakan SAK di periode selanjutnya. Badan usaha yang masuk dalam kriteria ETAP yakni perseroan terbatas, CV, firma, persekutuan, koperasi dan khususnya entitas yang tidak mempunyai akuntabilitas public signifikan. SAK ETAP lebih mudah dibanding dengan SAK dan lebih memudahkan saat menyusun pelaporan keuangan tahunan.

Ruang Lingkup SAK ETAP

SAK ETAP diterbitkan untuk digunakan oleh entitas tanpa akuntabilitas publik. Ada dua kriteria yang menentukan suatu entitas tergolong ETAP atau tidak, yaitu :

1. Tidak memiliki akuntabilitas publik yang signifikan
Suatu entitas dikatakan memiliki akuntabilitas publik yang signifikan jika :
 1. Entitas telah mengajukan pendaftaran atau masih dalam proses pengajuan pendaftaran pada otoritas pasar modal dengan tujuan penerbitan efek dipasar modal. Oleh karena itu Bapepam telah menerbitkan surat edaran mengenai larangan bagi pasar modal untuk menggunakan SAK ETAP.
 2. Entitas menguasai asset untuk sekelompok masyarakat, seperti asuransi, bank, pedagang efek atau pialang, reksa dana, bank investasi, dan dana pensiun.
2. Menerbitkan laporan keuangan dengan tujuan umum bagi pengguna eksternal. Contohnya yaitu pemilik yang tidak terlibat langsung dalam pengelolaan usaha dan kreditur.

Entitas yang memiliki akuntabilitas publik signifikan diperbolehkan menggunakan SAK ETAP apabilaizinkan oleh pihak otoritas. Kebijakan akuntansi SAK ETAP lebih ringan dalam beberapa aspek dibandingkan dengan PSAK, oleh karena itu ada beberapa ketentuan dalam SAK ETAP yang sangat ketat diantaranya :

1. Pada tahun awal diterbitkan SAK ETAP, entitas yang termasuk dalam kriteria ETAP boleh menyusun laporan keuangan berdasarkan PSAK non-ETAP apabila diterapkan secara konsisten. Artinya entitas tersebut tidak wajib menerapkan SAK ETAP untuk menyusun laporan keuangan berikutnya.

2. Entitas yang telah menyusun laporan keuangan sesuai SAK ETAP namun tidak memenuhi kriteria ETAP, maka entitas tersebut tidak diperbolehkan untuk menerapkan SAK ETAP.
3. Entitas yang sebelumnya menerapkan SAK non-ETAP namun memenuhi kriteria ETAP, maka diperbolehkan untuk menggunakan SAK ETAP dalam penyusunan laporan keuangan.

Laporan Keuangan Menurut SAK ETAP

Menurut IAI, Laporan keuangan sesuai SAK ETAP yaitu:

1. Neraca
2. Laporan Laba Rugi
3. Laporan Perubahan Ekuitas
4. Laporan Arus Kas
5. Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)

Neraca

Neraca yaitu laporan keuangan yang menunjukkan aset, kewajiban, dan ekuitas perusahaan pada akhir periode pelaporan. SAK ETAP tidak menentukan format dan urutan terhadap pos-pos yang disajikan. Neraca terdiri dari:

1. Utang usaha dan utang lainnya
2. Piutang usaha dan piutang lainnya
3. Aset dan kewajiban pajak
4. Kewajiban diestimasi
5. Aset tidak berwujud
6. Persediaan
7. Aset tetap
8. Property investasi
9. Ekuitas
10. Kas dan setara kas

Ketika mengklasifikasikan aset dan kewajiban pada neraca, perusahaan harus menyajikan aset lancar dan tidak lancar, serta kewajiban jangka panjang dan jangka pendek secara terpisah, kecuali jika informasi yang disajikan relevan dan andal.

Laporan Laba Rugi

Laporan laba rugi yaitu laporan keuangan yang menunjukkan pendapatan dan beban perusahaan pada periode waktu tertentu. Dengan kata lain, untuk mengetahui pendapatan dan beban yang berjalan, maka perlu menyajikan laporan laba rugi agar mengetahui apakah perusahaan menghasilkan laba atau tidak. Pos dalam laporan laba rugi, diantaranya ialah:

1. Beban pajak
2. Beban keuangan
3. Laba/rugi neto
4. Pendapatan

5. Bagian keuntungan atau kerugian dari investasi dengan menggunakan metode ekuitas.

Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan perubahan ekuitas yaitu laporan yang menunjukkan perubahan modal suatu perusahaan yang bertujuan untuk menghitung kenaikan atau penurunan kekayaan bersih (asset) selama periode tertentu dengan tetap berpegang pada prinsip penilaian tertentu. Laporan perubahan ekuitas terdiri dari:

1. Pengakuan penghasilan dan kewajiban secara langsung tercermin pada ekuitas di masa lalu.
2. Laba/rugi selama periode tersebut
3. Untuk setiap komponen ekuitas, jumlah tercatat awal dan akhir periode harus diungkapkan secara terpisah yang berasal dari:
 1. Pendapatan dan pengeluaran yang dicatat secara langsung
 2. Laba/rugi
 3. Total investasi, dividen, dan distribusi kepada pemegang ekuitas
4. Untuk bagian ekuitas, dampak dari perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi atas kesalahan diakui benar.

Laporan Arus Kas

Laporan arus kas ialah laporan keuangan yang menunjukkan arus kas masuk dan arus kas keluar perusahaan. Yang kemudian akan terlihat jumlah kas yang dikeluarkan oleh perusahaan, seperti hutang dan biaya yang harus dibayar.

Laporan arus kas dapat digunakan untuk menilai kinerja masa lalu perusahaan, kita perlu mengetahui aktivitas bisnis masa lalunya. Arus kas ini dapat dimanfaatkan dengan baik untuk membantu meningkatkan kegiatan ekonomi di masa depan. Aktivitas operasi meliputi aktivitas seperti menjalankan bisnis dan melakukan penjualan. Aktivitas investasi mencakup hal-hal seperti membeli dan menjual aset dan memberikan pinjaman. Aktivitas pendanaan mencakup hal-hal seperti menerbitkan saham dan meminjam uang.

Catatan Atas Laporan Keuangan

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia, CALK berisi informasi tambahan pada laporan keuangan. Catatan Atas Laporan Keuangan biasanya tersaji dibagian akhir laporan keuangan. CALK bermanfaat untuk :

1. Memberikan informasi tambahan yang bukan termasuk laporan keuangan.
2. Menyajikan informasi sesuai dengan persiapan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi.
3. Menyajikan informasi dalam SAK ETAP yang bukan bagian dari laporan keuangan.

Badan Usaha Milik Desa

Pasal 1 ayat (6) UU No. 6 Tahun 2014 mengenai Desa menjelaskan bahwa BUMDes ialah badan ekonomi yang modalnya dimiliki oleh desa dan diperoleh dari

pendapatan desa dan dialokasikan untuk pengelolaan asset dan penyedia layanan, serta operasi bisnis lainnya untuk kepentingan masyarakat Desa.

PERMENDAGRI No. 39 Tahun 2010 menyebutkan “untuk meningkatkan kemampuan keuangan pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui berbagai kegiatan usaha ekonomi masyarakat pedesaan, didirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa”.

Pembentukan BUMDes didasarkan pada UU Pemerintah Daerah No. 32 Tahun 2004 Pasal 213 (1) menjelaskan bahwa boleh mendirikan BUMDes berdasarkan dengan kebutuhan, kemampuan serta potensi desa.

Pembentukan BUMDes

Pembentukan BUMDes dilakukan melalui musyawarah Desa dan hasilnya harus sesuai dengan kesepakatan dalam Musyawarah Desa. Agar masyarakat dapat menyalurkan ide serta aspirasi dalam pengelolaan BUMDes, maka perlu diadakannya musyawarah desa. Bumdes terdiri dari berbagai macam usaha, misalnya usaha simpan pinjam, pengelolaan sampah, perdagangan serta jenis usaha lainnya sesuai dengan potensi desa.

BUMDes bisa memperoleh pinjaman atau bantuan dari pihak lain untuk mengembangkan usahanya. BUMDes juga dapat mengumpulkan simpanan dari masyarakat desa dan dapat meningkatkan sumber pendapatan desa dengan cara Pengelolaan dana bergulir dan industri simpan pinjam menyediakan layanan keuangan kepada konsumen dan bisnis. Dalam kegiatannya, BUMDes tidak hanya berfokus pada manfaat ekonomi, tetapi juga pada manfaat lingkungan dan seluruh masyarakat desa berperan penting dalam pengembangan BUMDes sebagai usaha ekonomi kerakyatan. Apabila BUMDes belum dapat dikelola dengan baik, maka akan merugikan serta memberikan masalah baru untuk masyarakat.

Untuk dapat menjalankan aktivitas usahanya, sebuah badan usaha memerlukan modal yang besar. Pendirian BUMDes diatur dalam undang-undang. Modal awal BUMDes berasal dari APBN. Maka dari itu, pendirian BUMDes harus dipersiapkan dengan matang sesuai dengan kesepakatan bersama supaya modal pendirian dan pengoperasian BUMDes bisa mengalir ke anggaran Desa.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Jenis dan sumber data yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data berasal dari data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini didapatkan melalui wawancara. Sedangkan data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari laporan neraca dan laporan laba rugi dari BUMDes Mekar Jaya Abadi. Selanjutnya, Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi. Dalam menganalisis data melalui tiga tahapan yaitu pengumpulan data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

III. Hasil Dan Pembahasan
 Analisis Penyajian Laporan Keuangan BUMDes Mekar Jaya Abadi Dengan SAK ETAP

Tabel 1. Hasil Analisis Neraca BUMDes Mekar Jaya Abadi dengan SAK ETAP

Pos Neraca		Hasil Penelitian	
		Ada/Tidak	Keterangan
Aset:	Kas dan setara kas	Ada	Sudah sesuai dengan SAK ETAP
	Piutang Usaha dan Piutang lainnya	Ada	Sudah sesuai dengan SAK ETAP
	Persediaan	Tidak	BUMDes tidak memiliki persediaan barang dagang
	Properti Investasi	Tidak	Tidak ada transaksi investasi
	Aset Tetap	Ada	Sudah sesuai dengan SAK ETAP
	Aset tidak berwujud	Tidak	BUMDes tidak memiliki aset tidak berwujud
Kewajiban:	Utang usaha dan utang lainnya	Ada	Sudah sesuai dengan SAK ETAP
	Kewajiban Pajak	Tidak	BUMDes Mekar Jaya Abadi tidak memasukkan kewajiban pajak di Neraca
	Kewajiban diestimasi	Tidak	BUMDes tidak melakukan pengestimasian kewajiban
Ekuitas :		Ada	Sudah sesuai dengan SAK ETAP

Tabel 2. Hasil Analisis Laporan Laba Rugi BUMDes Mekar Jaya Abadi dengan SAK ETAP

Pos Laba Rugi	Hasil Penelitian	
	Ada/Tidak	Keterangan
Pendapatan	Ada	Sudah sesuai dengan SAK ETAP
Beban Keuangan	Ada	Sudah sesuai dengan SAK ETAP
Laba (Rugi) Investasi dengan Metode Ekuitas	Tidak	Tidak ada transaksi investasi
Beban Pajak	Tidak	BUMDes Mekar Jaya Abadi tidak mencatat, tidak menghitung serta tidak melaporkan pajak dalam laporan laba rugi
Laba/Rugi Neto	Tidak	Belum sesuai dengan SAK ETAP karena belum dikurangi dengan pajak

Tabel 3. Hasil Analisis Laporan Perubahan Ekuitas BUMDes Mekar Jaya Abadi dengan SAK ETAP

Pos Perubahan Ekuitas	Hasil Penelitian	
	Ada/Tidak	Keterangan
Laba/Rugi untuk periode	Tidak	BUMDes Mekar Jaya Abadi tidak menyajikan Laporan Perubahan Ekuitas
Pendapatan atau beban yang diakui langsung dalam ekuitas	Tidak	BUMDes Mekar Jaya Abadi tidak menyajikan Laporan Perubahan Ekuitas
Koreksi atas kesalahan atau Perubahan Kebijakan Akuntansi	Tidak	BUMDes Mekar Jaya Abadi tidak menyajikan Laporan Perubahan Ekuitas
Rekonsiliasi antara jumlah tercatat awal dan akhir periode	Tidak	BUMDes Mekar Jaya Abadi tidak menyajikan Laporan Perubahan Ekuitas

Tabel 4. Hasil Analisis Laporan Arus Kas BUMDes Mekar Jaya Abadi dengan SAK ETAP

Pos Laporan Arus Kas	Hasil penelitian	
	Ada/Tidak	Keterangan
Aktivitas Operasi	Tidak	BUMDes Mekar Jaya Abadi tidak menyajikan pos untuk aktivitas operasi dan tidak menyajikan laporan arus kas
Aktivitas Investasi	Tidak	BUMDes Mekar Jaya Abadi tidak menyajikan pos untuk aktivitas investasi dan tidak menyajikan laporan arus kas
Aktivitas Pendanaan	Tidak	BUMDes Mekar Jaya Abadi tidak menyajikan pos untuk aktivitas pendanaan dan tidak menyajikan laporan arus kas

Analisis Laporan Keuangan BUMDES Mekar Jaya Abadi Desa Sei-Limbat Berdasarkan SAK ETAP

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti, BUMDes Mekar Jaya Abadi masih menyajikan laporan keuangan yang sederhana, dimana hanya terdapat neraca dan laporan rugi. Hal itu disebabkan kurangnya pengetahuan para pengurus BUMDes mengenai SAK ETAP.

Dalam SAK ETAP dijelaskan bahwa laporan keuangan ialah laporan yang menunjukkan posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas perusahaan. Penyajian laporan keuangan harus disajikan secara wajar dan lengkap seperti yang telah diatur dalam PSAK ETAP.

Laporan keuangan sesuai SAK ETAP yaitu:

1. Laporan Laba Rugi
2. Laporan Perubahan Ekuitas
3. Neraca
4. Laporan Arus Kas
5. Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)

Berikut penulis sajikan analisis laporan keuangan pada BUMDes Mekar Jaya Abadi :

Analisis Neraca

Neraca pada BUMDes Mekar Jaya Abadi terdiri dari aktiva, kewajiban, dan ekuitas . Akan tetapi, neraca BUMDes Mekar Jaya Abadi hanya menyajikan 4 dari 10 pos dalam neraca yang diatur dalam SAK ETAP yaitu: kas dan setara kas, piutang usaha dan piutang lainnya, aset tetap dan ekuitas. Kemudian dilihat dari nama yang dipakai oleh BUMDes Mekar Jaya Abadi masih menggunakan istilah Aktiva dan Pasiva, sedangkan dalam SAK ETAP 2009 istilah yang dipakai yaitu aset dan kewajiban, maka dari itu seharusnya mereka mengganti istilah aktiva dan pasiva dengan istilah aset dan kewajiban. Berdasarkan wawancara dengan Sekretaris BUMDes Mekar Jaya Abadi, ketidaksesuaian istilah akuntansi yang dipakai oleh BUMDes ialah karena mereka mengikuti panduan pencatatan yang dibuat oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Sekretaris BUMDes Mekar Jaya Abadi juga tidak mengetahui bahwa istilah akuntansi telah berubah sesuai dengan PSAK 16 tahun 2007 bahwa semua istilah aktiva dirubah menjadi aset. Dalam Neraca BUMDes Mekar Jaya Abadi juga terlihat bahwa aset lancar dan aset tetap disatukan. Seharusnya BUMDes Mekar Jaya Abadi menerapkan pemisahan penyajian akun aset lancar dan aset tetap sebagaimana yang telah diatur dalam SAK ETAP paragraf 4.1-4.14. Berikut ini adalah penyajian Neraca yang benar sesuai dengan SAK ETAP pada tabel 4.

Tabel 5. BUMDes Mekar Jaya Abadi Neraca (Sesuai SAK ETAP) Per 31 Desember 2021

NAMA AKUN	JUMLAH (Rp)
ASET LANCAR	Dr
- Kas	Rp. 46.213.275
- Kas di Bank	Rp. 100.736.999
- Piutang	Rp. 340.859.000
- Investasi Perdagangan	Rp. 31.080.000
- Investasi PPOB	Rp. 24.766.011
Jumlah Aset Lancar	Rp. 543.655.285
ASET TETAP	
- Inventaris	Rp. 16.350.000
- Akm. Penyusutan	(Rp. 7.883.395)
Jumlah Aset Tetap	Rp. 8.466.605
JUMLAH ASET	Rp. 552.121.890
KEWAJIBAN	Cr
- Simpanan Wajib	Rp. 16.992.000
	Rp. 41.901.500

- Simpanan Suka-suka	Rp. 38.695.810
- Surplus / Defisit ditahan	Rp. 17.363.306
- SHU 2020	
Jumlah Kewajiban	Rp. 114.952.616
EKUITAS	Cr
- Penyertaan Modal desa	Rp. 325.000.000
- Bantuan Kemendes	Rp. 50.000.000
- Laba tahun berjalan	Rp. 62.169.274
Jumlah Ekuitas	Rp. 437.169.274
Total Pasiva dan Ekuitas	Rp. 552.121.890

Analisis Laporan Laba Rugi

Laporan laba rugi memberi tahu kita berapa banyak uang yang dihasilkan perusahaan pada periode lalu. Sebagaimana dibahas dalam Bab 5 SAK ETAP, ada pos-pos yang harus dilaporkan entitas dalam laporan laba rugi, yaitu pendapatan, biaya keuangan, bagian laba (rugi) dari investasi metode ekuitas, beban pajak, dan rugi laba)

Pada BUMDes Mekar Jaya Abadi tidak semua pos-pos tersebut dicatat dalam laporan laba rugi. Pada laporan yang disusun oleh BUMDes Mekar Jaya Abadi yang tercantum hanya pendapatan dan beban keuangan. Untuk akun beban pajak tidak dicatat oleh BUMDes Mekar Jaya Abadi sehingga laba rugi belum dikurangi dengan potongan pajak. Sedangkan untuk pos bagian laba (rugi) dari investasi yang menggunakan metode ekuitas tidak ada karena BUMDes Mekar Jaya Abadi tidak memiliki investasi yang menggunakan metode ekuitas.

Dari laporan Laba Rugi BUMDes Mekar Jaya Abadi hanya mencantumkan 2 dari 5 pos-pos minimal yang harus ada dalam laporan laba rugi sesuai syarat yang berlaku pada SAK ETAP. Dalam penyajian laporan laba rugi BUMDes Mekar Jaya Abadi tahun 2021, tidak dicantumkan jumlah pajak yang dibayarkan sehingga tidak diketahui laba rugi neto seperti yang dicantumkan dalam SAK ETAP paragraph 5.3 yaitu adanya pos beban pajak setelah diketahui pendapatan perusahaan.

Akun pajak penghasilan secara jelas dinyatakan dalam paragraf 24.2 SAK. Pajak penghasilan meliputi semua pajak dalam negeri dan luar negeri, yang kemudian diperhitungkan sebagai penghasilan kena pajak. Pajak penghasilan juga termasuk pajak seperti pemotongan dan pemotongan pajak, yang terutang oleh anak perusahaan, asosiasi atau ventura bersama atas distribusi ke entitas pelapor. Berikut adalah penyajian Laporan Laba Rugi yang benar sesuai SAK ETAP:

Tabel 6. BUMDes Mekar Jaya Abadi Laporan Laba Rugi sesuai SAK ETAP Per 31 Desember 2021

NAMA AKUN	JUMLAH
PENDAPATAN	
- Jasa SPP	Rp. 83.799.000
- Administrasi SPP	Rp. 11.500.000
- Uang Awal SPP	Rp. 550.000
- Perdagangan	Rp. 4.956.000
	Rp. 2.794.274

- PPOB	Rp. 748.000
- Pendapatan lain-lain	
Jumlah Pendapatan	Rp. 103.997.274
BEBAN	
- Transportasi Pengurus	Rp. 1.300.000
- ATK	Rp. 960.500
- Honor	Rp. 26.400.000
- Admin Bank	-
- Inventaris	Rp. 265.000
- Beban Listrik	Rp. 945.000
- Fotocopy dan Percetakan	Rp. 297.500
- Beban lain-lain	Rp. 11.660.000
Jumlah Beban	Rp. 41.828.000
Laba/Rugi Kotor	Rp. 62.169.274
Hutang Pajak	Rp. 6.838.620
Laba/Rugi Bersih	Rp. 55.330.654

Berdasarkan wawancara yang dilakukan, BUMDes Mekar Jaya Abadi tidak membayar pajak atas keuntungan yang didapat karena minimnya pengetahuan pengurus BUMDes mengenai mekanisme pembayaran pajak serta tidak ada tagihan dari pihak wajib pajak. Sehingga mereka berfikir bahwa tidak ada kewajiban membayar pajak.

BUMDes Mekar Jaya Abadi belum menentukan taksiran pajak penghasilan. Berdasarkan Pasal 2 PP No. 30/2020 yang telah ditetapkan menjadi UU No. 2 Tahun 2020, tarif PPh Badan terbaru WP Badan dalam negeri dan berbentuk Badan Usaha Tetap yaitu 22% berlaku pada 2020 dan 2021. Untuk penghasilan kotor yang kurang dari Rp 4,8 miliar menggunakan perhitungan $50\% \times 22\% \times$ penghasilan kena pajak. Maka penghasilan kena pajak BUMDes Mekar Jaya Abadi yaitu $50\% \times 22\% \times 62.169.274 = \text{Rp } 6.838.620$.

Analisis Laporan Perubahan Ekuitas

Seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, BUMDes Mekar Jaya Abadi belum menyajikan Laporan Perubahan Ekuitas. Dalam SAK ETAP paragraph 6.2 menyebutkan "laporan perubahan ekuitas menyajikan laba atau rugi entitas untuk suatu periode, pos pendapatan dan beban yang diakui secara langsung dalam ekuitas untuk periode tersebut, pengaruh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan yang diakui dalam periode tersebut, dan jumlah investasi dan dividen serta distribusi lain ke pemilik ekuitas sebelum periode tertentu."

Laporan perubahan ekuitas merupakan bagian yang penting dalam laporan keuangan yang akan memberikan informasi mengenai jumlah laba dan perubahan terhadap ekuitas perusahaan tersebut. Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis, BUMDes Mekar Jaya Abadi tidak menyajikan laporan perubahan ekuitas karena laporan keuangan yang disusun masih sangat sederhana serta tidak adanya kepentingan bagi BUMDes untuk menyajikan secara lengkap.

Analisis Laporan Arus Kas

Dalam SAK ETAP paragraf 7.4 disebutkan “laporan arus kas menyajikan informasi perubahan historis atas kas dan setara kas entitas, yang menunjukkan secara terpisah perubahan yang terjadi selama satu periode dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.” Hal ini menunjukkan bahwa penyajian laporan arus kas harus dikelompokkan menurut aktivitas operasi, aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan.

BUMDes Mekar Jaya Abadi pada tahun 2021 tidak menyajikan laporan arus kas, padahal laporan arus kas merupakan bagian penting dalam penyusunan laporan keuangan dimana kita dapat mendapatkan informasi penggunaan kas suatu entitas. Tujuan dari laporan arus kas sendiri yaitu menyediakan informasi yang relevan mengenai pembayaran dan penerimaan kas perusahaan selama satu periode. Pencatatan arus kas harus dibuat secara rutin setiap satu periode perusahaan, hal ini berguna agar perusahaan bisa mengamati arus yang terjadi serta dapat memprediksi perkembangan perusahaan selama satu periode.

Analisis Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)

Dalam SAK ETAP paragraf 8.1-8.3 disebutkan : “CALK berisi informasi sebagai tambahan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dan informasi pos-pos yang tidak memenuhi kriteria pengakuan dalam laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan disajikan secara sistematis sepanjang hal tersebut praktis. Setiap pos dalam laporan keuangan merujuk-silang ke informasi terkait dalam catatan atas laporan keuangan.”

BUMDes Mekar Jaya Abadi tidak menyajikan CALK dalam penyusunan laporan keuangannya karena tidak adanya kepentingan atau urgensi, ini menyebabkan kurangnya informasi dalam memahami keberadaan posisi keuangannya.

Berdasarkan analisis yang dipaparkan diatas, maka bisa dilihat bahwa BUMDes Mekar Jaya Abadi belum sepenuhnya menerapkan SAK ETAP karena hanya menyajikan 2 dari 5 laporan keuangan yang telah diatur dalam ETAP. Yang artinya penerapan SAK ETAP pada laporan keuangan BUMDes Mekar Jaya Abadi masih mencapai 40% berdasarkan kriteria nilai persentase dari Dean J Champion.

Penerapan SAK ETAP pada laporan keuangan BUMDes sangat diperlukan karena jika BUMDes tidak menerapkan SAK ETAP hal itu akan membuat penyusunan laporan keuangan sedikit rumit untuk dipahami oleh pengguna informasi laporan keuangan BUMDes dikarenakan laporan keuangan yang disajikan tidak akurat, tidak lengkap, dan tidak fleksibel.

Perbandingan Laporan Keuangan BUMDes Mekar Jaya Abadi Dengan SAK ETAP

Berikut penulis sajikan tabel perbandingan penyajian laporan keuangan BUMDes Mekar Jaya Abadi dengan SAK ETAP .

Tabel 7. Perbandingan Penyajian Laporan Keuangan BUMDes Mekar Jaya Abadi Dengan SAK ETAP

BUMDes Mekar Jaya Abadi	SAK ETAP
1. Neraca	1. Neraca
2. Laporan Laba Rugi	2. Laporan Laba Rugi
	3. Laporan Perubahan Ekuitas
	4. Laporan Arus Kas
	5. Catatan Atas Laporan Keuangan

Dari tabel 7 tersebut bisa disimpulkan bahwa BUMDes Mekar Jaya Abadi belum sepenuhnya menyusun laporan keuangan sesuai dengan SAK ETAP karena BUMDes Mekar Jaya Abadi hanya membuat 2 laporan keuangan dari 5 laporan keuangan yang ditetapkan dalam SAK ETAP.

Secara umum, BUMDes Mekar Jaya Abadi masih terdapat kekurangan dalam penyajian laporan keuangan tahun 2021 diantaranya pada Neraca dan Laba Rugi.

Bisa dilihat dari perbandingan laporan keuangan BUMDes Mekar Jaya Abadi dengan SAK ETAP masih terdapat banyak kekurangan didalamnya, maka dari itu penting bagi instansi yang menaungi BUMDes khususnya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk memberikan pelatihan mengenai laporan keuangan berbasis SAK ETAP agar BUMDes Mekar Jaya Abadi dapat menerapkan standar keuangan yang berlaku.

Dalam prakteknya, belum semua entitas menerapkan standar SAK ETAP yang dikeluarkan oleh IAI. Bisa dilihat dari data diatas bahwa BUMDes Mekar Jaya Abadi Desa Sei-Limbat belum menerapkan SAK ETAP secara penuh. Dalam penyusunan neraca dan laba rugi juga masih ada yang tidak sesuai dengan SAK ETAP. Bukan hanya itu, BUMDes Mekar Jaya Abadi juga tidak menyatakan kepatuhannya pada SAK ETAP untuk membuat suatu pernyataan secara jelas dan penuh pada Laporan perubahan ekuitas, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan, ini juga disebut sebagai suatu pelanggaran dalam nilai-nilai syariah yang terkandung didalam akuntansi (Azmi,2018) yang mana nilai-nilai itu ialah :

1. Nilai Kepatuhan
2. Nilai Pertanggungjawaban
3. Nilai Transparasi

Nilai kepatuhan ini sangat erat pada proses akuntansi keuangan yang diakibatkan oleh kejelasan serta bermacam bentuk laporan keuangan. Seharusnya, nilai kepatuhan ini juga harus erat pada BUMDes Mekar Jaya Abadi karena BUMDes merupakan lembaga yang sah secara hukum untuk mengelola simpan pinjam serta unit usaha lainnya sehingga wajib bagi BUMDes Mekar Jaya Abadi untuk patuh pada SAK ETAP sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia. Nilai kepatuhan ini juga implementasi dari firman Allah SWT :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Terjemahan:

“Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” [An-Nisaa:59]

Hubungan antara ayat diatas dengan nilai kepatuhan dalam pelaporan keuangan ialah bahwa setiap entitas atau lembaga yang sah secara hukum harus mengikuti segala ketentuan yang telah dibuat oleh *amiir* (pemimpin). Pemimpin dalam konteks ini yaitu Ikatan Akuntansi Indonesia yang bertugas menerbitkan standar-standar akuntansi.

Selain nilai kepatuhan, nilai pertanggungjawaban juga sangat erat pada proses pengelolaan dan penyajian laporan keuangan yang dilakukan agar uang negara yang diamanahkan untuk dikelola oleh BUMDes Mekar Jaya Abadi dapat dipertanggungjawabkan dengan sebaik-baiknya demi kebaikan umat khususnya warga desa Sei-Limbat. Para pengurus BUMDes Mekar Jaya Abadi harus menanamkan nilai pertanggungjawaban agar dapat menambah rasa kepercayaan dalam menyajikan laporan keuangan serta merasa memiliki rasa tanggungjawab pada Allah SWT terhadap segala bentuk penyajian laporan keuangan.

Nilai pertanggungjawaban tersebut sesuai dengan hadits Rasulullah SAW yang bunyinya :

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ الْإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا وَالْخَادِمُ رَاعٍ فِي مَالِ سَيِّدِهِ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ قَالَ وَحَسِبْتُ أَنْ قَدْ قَالَ وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي مَالِ أَبِيهِ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

“Abdullah bin Umar r.a. berkata bahwa Rasulullah saw telah bersabda, “Ketahuilah: kalian semua adalah pemimpin (pemelihara) dan bertanggung jawab terhadap rakyatnya. Pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya tentang rakyat yang dipimpinya. Suami adalah pemimpin bagi keluarganya dan akan dimintai pertanggungjawabannya tentang keluarga yang dipimpinya. Isteri adalah pemelihara rumah suami dan anak-anaknya. Budak adalah pemelihara harta tuannya dan ia bertanggung jawab mengenai hal itu. Maka camkanlah bahwa kalian semua adalah pemimpin dan akan dituntut (diminta pertanggungjawaban) tentang hal yang dipimpinya”

Makna yang terkandung dalam hadits diatas yaitu bahwa setiap manusia akan diminta pertanggungjawaban terhadap segala sesuatu yang diamanahkan kepadanya. Bukan hanya seorang pemimpin, melainkan semua orang yang diberi amanah juga akan diminta pertanggungjawaban.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Yuliani dan Bustaman, 2017) disebutkan: “Akuntabilitas bisa diartikan sebagai suatu kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan kegiatan

organisasi serta mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik". Dalam penelitian tersebut juga dinyatakan bahwa ruang lingkup akuntabilitas dalam akuntansi Islam meliputi 4 jenis akuntabilitas, salah satunya yaitu akuntabilitas kepada Tuhan atau pertanggungjawaban terhadap Tuhan.

Adapun nilai transparansi juga sangat erat pada penyajian laporan keuangan SAK ETAP yang agar dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap laporan keuangan yang dibuat oleh BUMDes Mekar Jaya Abadi Desa Sei-Limbat. Nilai transparansi ini melekat pada BUMDes Mekar Jaya Abadi juga disebabkan agar terciptanya rasa saling percaya dan menghargai antara berbagai pihak. Baik antara BUMDes dengan Masyarakat desa, maupun antara BUMDes dengan pemerintah di tingkat desa maupun di tingkat kabupaten.

IV. Kesimpulan Dan Saran

Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dikemukakan diatas, dapat disimpulkan bahwa :

1. Laporan keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Mekar Jaya Abadi desa Sei-Limbat belum menerapkan SAK ETAP. Praktik akuntansi pada BUMDes mengacu pada SAK ETAP (2013) belum terlaksana karena kurangnya pengetahuan pengurus BUMDes mengenai SAK ETAP.
2. BUMDes Mekar Jaya Abadi Desa Sei-Limbat hanya menyajikan laporan keuangan berupa Neraca dan Laba Rugi. Sedangkan dalam SAK ETAP laporan keuangan terdiri dari:
 1. Neraca
 2. Laporan Laba Rugi
 3. Laporan Perubahan Ekuitas
 4. Laporan Arus Kas
 5. Catatan Atas Laporan Keuangan
3. BUMDes Mekar Jaya Abadi tidak menyajikan semua pos yang ada dalam komponen laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP, artinya masih terdapat banyak kekurangan dalam penyajiannya.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan, maka penulis menyarankan beberapa hal antara lain :

1. BUMDes Mekar Jaya Abadi harus segera menyesuaikan laporan keuangannya dengan SAK ETAP karena laporan keuangan sangat penting bagi pihak internal maupun eksternal.
2. Diperlukan pelatihan mengenai laporan keuangan berbasis SAK ETAP secara rutin agar BUMDes Mekar Jaya Abadi dapat menyusun laporan keuangannya dengan lengkap serta sesuai dengan pedoman standar yang berlaku yaitu SAK ETAP.
3. BUMDes Mekar Jaya Abadi perlu mempekerjakan pegawai dibidang akuntansi yang memadai agar laporan keuangan yang disusun bisa sesuai dengan standar.

4. BUMDes Mekar Jaya Abadi perlu melakukan pemisahan antara aset lancar dan aset tetap pada laporan neraca yang dibuat agar diketahui dengan jelas berapa jumlah dari masing-masing akun.

V. Daftar Pustaka

- Alfurkaniati, dkk. *Pengantar Akuntansi I*. Medan: Madenatera, 2017
- Andayani, Ketut Putri, and I Ketut Sudiarta. "Pembentukan Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Sebagai Sarana Meningkatkan Pendapatan." *Jurnal Kertha Negara* 9, no. 5 (2021): 366–377.
- Anggito, Albi and Johan Setiawan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jawa Barat: CV Jejak, 2018
- Atika. "Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Sistem Bagi Hasil Dalam Program Tabungan Bank Syariah Mandiri Cabang Medan." *Jurnal Ekonomi Islam* V, no. 1 (2020): 163–182.
- Bahri, Syaiful. *Pengantar Akuntansi Berdasarkan SAK ETAP dan IFRS*. Yogyakarta: CV Andi Offset, 2020
- Dalimunthe, Ahmad Amin and Rina Rahmadani Sidabutar, *Research Methodology*. Medan: 2020
- Edi, Fandi Rosi Sarwo, *Teori Wawancara Psikodignotik* (Yogyakarta: Leutikaprio, 2016)
- Fatihudin, Didin. *Metode Penelitian Untuk Ilmu Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi*, Sidoarjo: Zifatama Publishing, 2015
- Harjanto. *Perencanaan Pengajaran*. Jakarta: Rineka Cipta, 2001.
- Hermain, Hendra. dkk. *Akuntansi Syariah Di Indonesia*, Medan: Madenatera, 2019
- Hermain, Hendra. dkk. *Pengantar Akuntansi I*, Medan: Madenatera, 2019
- Hidayat, Wastam Wahyu. *Dasar-dasar Analisa Laporan Keuangan*, Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2018.
- <https://iaiglobal.or.id> diakses pada tanggal 28 oktober 2021 pukul 09.55 wib
- Ikhsan, Arfan and Imam Ghozali. *Metologi Penelitian Kualitatif*. 1st ed. Medan: PT. Madju Medan Cipta, 2006
- Ikhsan, Arfan dkk, *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen*, Bandung: Citapusaka Media, 2014
- Kemenkeu, <https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2014/6TAHUN2014UU.htm> diakses pada tanggal 28 oktober 2021 pukul 09.36 wib.
- Khaddafi, Muammar dkk. *Akuntansi Syariah*, Medan: Madenatera, 2017
- Leksono, Sonny. *Penelitian Kualitatif Ilmu Ekonomi Dari Metode ke Metode*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013
- Moleoang, Lexy J. *Metodologi Penelitian Untuk Akuntansi dan Manajemen*. Bandung: Remaja Rosdakary, 2006.
- N, Daldjoeni. *Interaksi Desa-Kota*. Jakarta: Rineka Cipta, 1987.
- Rahmawati, Emma. "Analisis Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bum Desa) Di Kabupaten Bandung Barat." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis* 25, no. 1 (2020): 1–13.
- Sirait, Pirmatua. *Pelaporan dan Laporan Keuangan*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014
- Siswanti, Tutik. dkk., *Pengantar Akuntansi*. Jawa Tengah: PT. Nasya Expanding

- Management, 2022.
- Sitompul, Mhd Syahman, Nurlaila, and Hendra Harmain. "Implimentasi Surat Al-Baqarah Ayat 282 Dalam Pertanggungjawaban Mesjid Di Sumatera Timur." *Human Falah* Volume 3, no. 2 (2016): hlm. 209.
- Sri, Amelia, and Kusuma Dewi. "Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sebagai Upaya Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) Serta Menumbuhkan Perekonomian Desa." *Journal Of Rural and Development* V, no. 1 (2014): 1-14.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2007
- Sukiati. *Metodologi Penelitian Sebuah Pengantar*, Medan: Perdana Publishing, 2020
- Sumiasih, Kadek. "Peran BUMDes Dalam Pengelolaan Sektor Pariwisata (Studi Di Desa Pakse Bali, Kabupaten Klungkung)." *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 7, no. 4 (2018): 565.
- Umar, Husein. *Riset Sumber Daya Manusia Dalam Organisasi*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2005.
- Vardiansyah, Dani. *Filsafat Ilmu Ekonomi*. Jakarta: 2014.
- Waridyantan. *Metode Penelitian Pariwisata*, Yogyakarta: Penerbit Andi, 2010.